

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdoellah, Priyatmanto, 2020, *Revitalisasi Kewenangan PERATUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Admosudirjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Bandung.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *KUHPerdata-Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Banks, Fiona dan Michael Bowsher QC, 2011, "Damages Remedy in England & Wales and Northern Ireland", dalam Duncan Fairgrieve dan François Lichère (ed.), *Public Procurement Law: Damages as an Effective Remedy*, Hart Publishing, Oxford.

Basah, Sjachran, 1992, *Pelindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

_____, 2010, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cet. 3, Alumni, Bandung.

- Boediono, 2016, *Ekonomi Makro*, BPFE, Yogyakarta.
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia (Upaya Menuju "Clean And Stable Government")*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2018, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2016, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Indrati S., Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mc Eachern, 2000, *Ekonomi Makro*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- _____, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2008, *Hukum dan Masyarakat*, Genta Press, Yogyakarta.
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simorangkir, Iskandar dan Suseno, 2004, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-32, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Taufiqurrahman, Mhd, 2021, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, CV. Literasi Nusantara, Malang.

Tim Penyusun, 2011, *Perkembangan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dilihat dari beberapa Sudut Pandang*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Wibowo, Richo Andi *et. al*, 2024, *Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer dan Kasus*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Wijoyo, Suparto, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal :

Abrianto, Bagus Oktafian, *et al.*, "Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Negara Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.

Akbar, Muhammad Kamil, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Maret 2022.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, "Onrechtmatig Overheidsdaad oleh Pemerintah dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018.

Djafar, Wahyudi, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010.

Effendi, Maftuh, "Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi", *Jurnal Perspektif*, Vol. XV, No. 4, Oktober 2010.

Fauzani, Muhammad Addi dan Fandi Nur Rohman, "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Fauzi, Muhammad Alifian Geraldi dan Anna Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

Manullang, E. Fernando M., "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Maulidina, et al., "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance", *Yustisi*, Vol. 10, No. 1, Februari 2023.

Putri, Sherlyn Novtrisy Melati dan Isep H Insan, "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol. 8, No. 6, 2024.

Putrijanti, et al., "Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, Juni 2017.

Rahman, Lingga Abi, et al., "Sistem Pengawasan dan Pelindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara", *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 4, 2024.

Ratnaningsih, Erna, "Tuntutan Ganti Rugi Pada Perluasan Kewenangan PERATUN (Studi Kasus Banjir Jakarta dan Banjarmasin)", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 7, No. 1, Januari 2023.

Ridwan, "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 11, No. 1, Mei 2022.

Rosalina, Henny Natasha dan Lazarus Tri Setyawanta, "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Mei 2020.

Simanjuntak, Enrico, "Tantangan dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.

Siregar, Praise Junta W.S., "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum", *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 37, Juni 2022.

Syofyan, et al., "Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022.

Tesis dan Disertasi :

Rohmad Pujiyanto, 2023, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Muhammad Ardhymas Lazuardi, 2021, *Implikasi Perubahan Kewenangan Mengadili Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dari Peradilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara ditinjau berdasarkan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan*, Tesis, Program Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada.

Cornellius Bramantya, 2022, *Perluasan Kewenangan Ombudsman RI dan Implikasinya terhadap PERATUN dalam Sengketa Ganti rugi Pelayanan Publik*, Tesis, Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada.

Internet :

“Daftar Pengadilan”, Lihat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/index/ditjen/tun.html> (diakses 22 Oktober 2024, 15.50 WIB).

“Sistem Informasi Penelusuran Perkara PERATUN Jakarta”, Lihat di https://sipp.PERATUN-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara (diakses 21 Februari 2025, 17.01 WIB).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1571.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1991.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1129/Kmk.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/SIP/1969 tentang Risiko atas Perubahan Nilai Uang

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PERATUN) Jakarta Nomor :
205/G/TF/2021/PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PERATUN) Pekanbaru Nomor
23/G/TF/2020/PTUN.PBR.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara(PERATUN) Jakarta Nomor :
28/G/TF2022/PTUN.JKT.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Medan Nomor :
22/B/TF/2021/PTTUN.MDN.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PTTUN) Jakarta Nomor
171/B/TF/2022/PT.TUN.JKT.

Putusan Mahkamah Agung(MA) Nomor : 367 K/TUN/TF/2021

Putusan Mahkamah Agung(MA) Nomor : 172 PK/TUN/TF/2022

Putusan Mahkamah Agung(MA) Nomor : 184 K/TUN/TF/2023

Wawancara:

Wawancara dengan Faisal Zad, Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, pada 7 Maret 2025

Wawancara dengan Yusuf Ngongo, Hakim PTUN Surabaya, pada 25 Februari 2025

Wawancara dengan Mohammad Erzad Kasshiraghi, Kuasa Hukum Penggugat
dalam Kasus Omission Ganti Rugi Ahli Waris Hj. Sapia dalam Putusan PTUN
Jakarta No. 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, pada 19 Februari 2025